

## TAJUK RENCANA

### Anggaran Efisiensi, Genjot Pendapatan

**EFISIENSI** anggaran sedang menjadi trending topik. Di mana-mana, khususnya di lingkungan instansi pemerintah, topik yang paling banyak dibicarakan saat ini hanya soal efisiensi anggaran, tentu saja juga realisasi dan dampak-dampaknya. Buntut dari kebijakan ini antara lain muncul lagi wacana *work from home* atau (WFH), meski tidak bisa semua instansi menerapkan pola kerja ini, khususnya instansi pelayanan masyarakat. Bahkan sudah ada lembaga pemerintah yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Dalam Inpres itu, Presiden meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 triliun. Hasil efisiensi akan digunakan untuk menjalankan program prioritas pemerintah, termasuk memperluas jangkauan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Semua instansi terkena instruksi tersebut. Sebab anggaran mereka dipotong dengan besaran yang sangat signifikan. Misalnya Kementerian PU dari alokasi Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun. Kemudian BMKG, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, anggaran BMKG dipotong 50,35 persen menjadi Rp 1,423 triliun dari semula Rp 2,826 triliun.

Untuk menjalankan program-program pemerintah, khususnya program baru Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan biaya yang sangat banyak. Karena itu bisa dimaklumi kalau banyak anggaran tersedot ke sana. Untuk mengatasi, selain melakukan efisiensi di semua lini mestinya juga ada upaya untuk menggenjot pendapatan. Jangan sampai kebutuhan meningkat tetapi pendapatan masih tetap sama saja. Paling ideal memang antara kebutuhan (pengeluaran) dengan pendapatan adalah seimbang.

Karena itu potensi-potensi negara yang masih bisa digali mestinya dimaksimalkan, misalnya dari pajak khususnya dari perusahaan-perusahaan

besar, juga mungkin dari pertambahan yang penghasilannya juga besar. Bisa juga dari CSR BUMN-BUMN dan berbagai perusahaan. Selain itu kebororan juga harus ditekan, bahkan ditiadakan, antara lain berupa korupsi, pemberian komisi dari proyek-proyek, pengadaan barang dan jasa, serta biaya-biaya yang tidak perlu.

Sebenarnya, dari orang-orang kaya di Indonesia juga bisa menjadi sumber pemasukan untuk membiayai program-program sosial kemasyarakatan, termasuk untuk program MBG. Sebab, dalam ajaran semua agama ada kewajiban bagi orang kaya untuk mendermakan sebagian kekayaannya. Misalnya kewajiban zakat (2,5%) bagi orang Islam. Dalam tradisi Hindu ada Dharma Dana, yaitu suatu kewajiban untuk menyisihkan 2,5% - 5% penghasilan sebagai suatu bentuk ekspresi kebajikan dari ajaran Dharma. Dalam ajaran Buddha ada konsep "berdana" dengan membangun ketulusan dalam melakukan amal baik dalam berbagai bentuk: ketulusan memberi, membantu dan menolong, baik secara material (*amisa dana*) maupun non-material/bantuan tenaga (*paricaya dana*), memberikan dukungan moral dan rasa aman (*abhaya dana*) dan berbagai ilmu pengetahuan (*dhamma dana*). Umat Kristiani juga mempunyai kewajiban moral untuk mendonasikan sekitar 10% penghasilannya, dikenal sebagai se-persepuluhan (*tithe*) (Hilman Latif).

Kalau kewajiban derma ini bisa diterapkan pada semua orang kaya, maka akan terkumpul dana yang signifikan. Mungkin hal ini bisa dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden serja jajaran kabinet. Kita tahu menurut LHKPN mereka kaya semua, harta mereka miliaran bahkan ada yang mencapai triliun. Seandainya gaji mereka sebulan saja disumbangkan untuk program MBG kehidupan mereka tidak akan terganggu. Selain itu, kalau ajaran agama mereka mengenai kewajiban berderma diterapkan, dari kekayaan perorang yang miliaran rupiah atau triliun rupiah akan sangat membantu program pemerintah. Jajaran kabinet sangat pantas untuk memulai sebagai contoh. (\*)-d



#### EFISIENSI

adalah konsep pengelolaan sumber daya secara optimal guna mencapai hasil maksimal dengan usaha minimal. Dalam konteks pemerintahan, efisiensi menjadi kunci dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan biaya yang lebih rasional. Namun, efisiensi sering diartikan sekadar pemotongan anggaran, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas layanan dan pembangunan. Karena itu, memahami makna efisiensi yang sesungguhnya serta cara implementasi yang tepat menjadi hal yang sangat penting.

#### Makna Efisiensi

Efisiensi terdefiniskan sebagai upaya menggunakan sumber daya, baik keuangan, tenaga kerja, maupun waktu, secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pelayanan publik, efisiensi terukur dari berbagai aspek, seperti kecepatan layanan, ketepatan kebijakan, serta kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan biaya yang masuk akal. Jika suatu instansi mampu menjalankan tugasnya dengan baik tanpa membuang-buang sumber daya, instansi tersebut bisa dikatakan efisien.

Untuk mencapai efisiensi yang benar, pemerintah dan birokrasi harus menerapkan strategi yang tepat. Berikut langkah yang dapat diambil:

Satu, Digitalisasi dan Otomatisasi dapat dimanfaatkan untuk mengurangi proses manual yang lambat dan inefisien. Digitalisasi dapat mengurangi kebutuhan alat tulis kantor serta mempercepat administrasi. Optimasi rute transportasi dengan teknologi geospasial mampu mengurangi beban jalan raya dan mempersingkat waktu tempuh. Optimasi sebaran konstruksi atau perawatan jalan baik dalam ruang maupun waktu pengerjaan dapat dilakukan agar tak terjadi kemacetan. Hanya perlu diantisipasi agar digitalisasi tidak justru malah menaikkan biaya dan waktu, akibat pelaksana yang inkompeten. Dua, Evaluasi harus berkala dilakukan atas program-program yang berjalan, menghapus yang tidak produktif, dan mengalokasikan ke sektor yang lebih berdampak nyata. Pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel berdasar

#### Fahmi Amhar

kebutuhan nyata, bukan kepentingan tertentu. Ini akan mencegah pemborosan, kebocoran dan praktik korupsi. Meletakkan setiap program di atas peta digital akan sangat mempermudah evaluasi dan meningkatkan transparansi. Kita jadi tahu, puluhan juta rakyat yang miskin itu di mana saja? Anak-anak yang butuh Makan Bergizi Gratis di mana saja? Rakyat luas seharusnya dapat ikut memantau!

Tiga, Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerja-

sehingga perbaikannya di masa depan lebih mahal. Pemangkasan anggaran riset dan pengembangan justru dapat membuat daya saing suatu negara menurun karena kurangnya inovasi. Penguangan anggaran pendidikan dan pelatihan pegawai dapat berujung pada kualitas pelayanan publik menurun.

Di sisi lain, banyak pemborosan di birokrasi yang harus dieliminasi demi efisiensi yang sesungguhnya, seperti seremonial berlebihan yang tidak bermanfaat nyata, perayaan hari jadi instansi dengan mewah, dan sebagainya. Atau perjalanan dinas tanpa urgensi yang jelas dan hanya menjadi ajang plesiran dengan biaya negara. Atau pengadaan alat tulis kantor tanpa analisis kebutuhan yang memadai, sering dengan harga yang *dimark-up*. Tak ketinggalan anggaran konsultasi dengan laporan yang asal-asalan, sekadar salinan laporan lain. Bahkan tak pernah digunakan usai dibuat.

#### Contoh di Negara Lain

Di AS, tahun 2025 ini Presiden Trump mendorong efisiensi birokrasi dengan menunjuk Elon Musk memimpin reformasi melalui pembentukan Department of Government Efficiency (DOGE). Departemen ini bertugas meninjau anggaran pemerintah, memangkas pengeluaran yang tak produktif, serta menerapkan teknologi dan inovasi guna meningkatkan efektivitas layanan publik. Elon berhasil membuat transportasi dan peluncuran roket ke ruang angkasa sangat efisien, dipandang mampu melakukan efisiensi berbasis manajemen modern yang berorientasi pada hasil tanpa mengorbankan kualitas layanan. (\*)-d

**\*)Prof Dr-Ing Fahmi Amhar,**  
Peneliti Geoinformatika, Badan Riset & Inovasi Nasional.



KR-1000 SANTOSO

an, sehingga mengurangi kesalahan yang berujung pemborosan. Harus diakui juga bila sebaran tenaga ahli atau terampil kita masih jauh dari merata. Di sini peran informasi geospasial menjadi penting untuk menata sebaran SDM yang kompeten sesuai kebutuhannya.

Keempat, Koordinasi antarinstansi dapat mengurangi tumpang tindih dan mempercepat implementasi program. Sebagian besar pertemuan-pertemuan kedinasan mungkin lebih optimal bila dilakukan online saja. Bahkan bila koordinasi online sudah baik, kebutuhan adanya Ibu Kota Negara secara fisik dapat ditekani. Kekawatiran bahwa IKN mangkrak tak perlu terjadi, karena tak perlu dibangun!

#### Efisiensi yang Keliru

Beberapa contoh pemangkasan anggaran yang justru merugikan dalam jangka panjang: Pemangkasan anggaran pemeliharaan infrastruktur justru dapat menyebabkan infrastruktur cepat rusak,

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,

Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

**Komisaris:** Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

**Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

**Direktur Keuangan:** Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.

**Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis:** Yoeke Indra Agung Laksana, SE

**Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)  
**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

## Geospasial untuk Efisiensi APBN



#### BENCANA

adalah permasalahan kompleks yang tak dapat diatasi oleh satu pihak saja. Kajian Risiko Bencana DIY untuk tahun 2021-2026 menunjukkan ada 6 jenis ancaman yang memiliki risiko tinggi, yaitu banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami, dari 12 ancaman yang diidentifikasi di DIY.

Berdasar Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 DIY, memiliki indeks risiko bencana 102,83. Capaian tersebut meningkat dibanding tahun 2023, dengan IRB 108,15. Capaian 2023 dan 2024 tersebut mencerminkan konsistensi keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana DIY, dengan kondisi awal pada tahun 2019 IRB DIY sebesar 148,00 (kategori tinggi). Penurunan indeks risiko ini merupakan hasil kolaborasi berbagai elemen, mulai pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, media, hingga lembaga usaha.

Salah satu tantangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana DIY adalah masih tingginya risiko bencana di Kawasan Selatan. IRB tahun 2024 untuk Kabupaten Kulonprogo sebesar 152,65 yang justru meningkat (memburuk) dibanding capaian pada 2023 sebesar 140,98.

Kabupaten Bantul meski skor indeksnya turun (membaik) pada 2024 sebesar 129,50 dibanding capaian tahun 2023 sebesar 149,27, namun masih relatif tinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di DIY. Sedangkan Gunungkidul mencapai perkembangan peningkatan yang signifikan dari capaian sebesar 106,55 di tahun 2023 menjadi 94,43 pada tahun 2024.

IRB di 3 kabupaten pada kawasan selatan DIY yang masih relatif tinggi tersebut mengindikasikan tantangan pengelolaan pembangunan DIY yang prioritasnya di kawasan selatan harus mampu mengelola risiko bencana yang ada serta tidak menambak faktor risiko bencana. Kawasan Selatan DIY memiliki nilai

#### M Taufiq AR

strategis untuk pertumbuhan ekonomi di DIY dan niscaya diandalkan menjadi pilar ekonomi DIY. Dengan garis pantai sepanjang 113 km, wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Pemda DIY dalam satu dasawarsa terakhir serius mengupayakan pembangunan Kawasan Selatan, seperti pengembangan infrastruktur wilayah, pengembangan aktivitas rekreasi, dan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan wilayah Selatan DIY. Dengan paradigma *idevelopment follows infrastructure*, pembangunan infrastruktur di kawasan selatan diharapkan dapat memicu kebangkitan ekonomi di wilayah sekitarnya.

Strategi pengelolaan pembangunan DIY yang prioritasnya di kawasan selatan agar mampu mengelola risiko bencana yang ada serta tidak menambah faktor risiko bencana, di antaranya: pertama, peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana di kawasan selatan, di antaranya melalui pembangunan infrastruktur tangguh bencana seperti bangunan publik tahan gempa, rambu dan jalur evakuasi yang aman maupun sistem drainase adaptif untuk ancaman bencana gempa, serta pengembangan teknologi pemantauan dan peringatan dini multi-bencana berbasis komunitas dan data *real-time*.

Kedua, penguatan tata ruang dan regulasi berbasis risiko, di antaranya penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan hasil kajian risiko bencana dan *carrying capacity* lingkungan, serta penerapan standar bangunan tahan gempa dan tsunami un-

tuk kawasan permukiman, fasilitas publik, dan kawasan usaha, termasuk dalam regulasi tata ruang wilayah selatan DIY.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat dan penguatan ketangguhan sosial-ekonomi, di antaranya pengembangan ekonomi berbasis ketangguhan dengan sektor usaha yang tidak meningkatkan risiko bencana, seperti eko dan eduwisata dan geoheritage tangguh bencana dalam koridor *green and blue economy*.

Keempat, mengembangkan inovasi dalam pengurangan risiko bencana melalui pendekatan berbasis komunitas yang lebih inklusif, terintegrasi dengan reformasi kalurahan, dengan mengutamakan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak. Perlindungan sosial adaptif terhadap kelompok berisiko niscaya juga akan mengurangi faktor kerentanan di Kawasan Selatan.

Melalui pendekatan simultan tersebut, niscaya DIY dapat mewujudkan kawasan selatan sebagai etalase dari kesuksesan penataan lingkungan yang lestari, industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pengelolaan wisata yang aman, kawasan permukiman yang asri, serta tangguh bencana. (\*)-d

**\*)M Taufiq AR,** Koordinator Umum  
FPRB DIY 2025-2029.

## Pojok KR

Erdogan apresisi sikap tegas RI dukung Palestina.

- Sikap Indonesia tak pernah goyah.

\*\*\*

Anggaran untuk petani aman dari efofocusingi.

- Hasil pertanian harus meningkat.

\*\*\*

Dunia pendidikan harus terus berinovasi.

- Berinovasi tiada henti!

Berabe